

# IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN MADRASAH ALIYAH DI KABUPATEN BANDUNG

M Hijrah M Saway\*, Ara Hidayat\*\*  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
\*sawayhijrah@gmail.com  
\*\* arahidayat@uinsgd.ac.id

## Abstract

*Facilities and infrastructure resources (such as the availability of learning tools or facilities that are quantitatively, qualitatively, classrooms appropriate to the number of students, school buildings that are relevant to the needs) are important inputs needed for ongoing education in schools. This research is a field research using purposive sampling which aims to analyze the findings of research relating to the planning and funding sources of funds, the implementation and budgeting of funding funds, evaluation of funding funds in the maintenance of learning facilities and infrastructure. This type of research is descriptive qualitative using data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. After collecting various types of data related to the research problem, then verify the validity of the research data by triangulating the data. The results of this study indicate that the planning of funding sources in Madrasah al-Ikhlâs Cicalengka through the analysis of the activities of the use of financial resources and the activities of institutions while the source of funds in Madrasah Aliyah al-Ikhlâs and contributions from the community which are then used to finance programs or school activities such as improvement and maintenance of school facilities and infrastructure and teacher payroll. Budgeting of funds used for maintenance of facilities and infrastructure is good. The use of funds sourced from the central or regional government, especially for the maintenance of facilities and infrastructure, teacher salaries, and improvement of buildings has been done optimally.*

**Keywords:** *Financing Management, Infrastructure, Learning*

**Abstrak :** Sumber daya sarana dan prasarana (seperti tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, ruang kelas yang sesuai dengan jumlah siswa, bangunan sekolah yang relevan dengan kebutuhan) merupakan input penting yang diperlukan untuk berlangsungnya pendidikan di sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan *purposive sampling* yang bertujuan untuk menganalisis hasil temuan penelitian yang berkaitan dengan perencanaan dan sumber pembiayaan dana, pelaksanaan dan penganggaran pembiayaan dana, evaluasi pembiayaan dana dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah terkumpul berbagai jenis data yang berkaitan dengan masalah penelitian, lalu memverifikasi keabsahan data penelitian dengan triangulasi data. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa, perencanaan sumber pembiayaan dana di Madrasah al-Ikhlâs Cicalengka melalui analisis aktivitas guna mengidentifikasi biaya sumber

daya dan aktivitas lembaga adapun sumber dana di Madrasah Aliyah al-Ikhlas Cicalengka berasal dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai program atau kegiatan sekolah seperti peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dan penggajian guru. Penganggaran dana yang di gunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sudah cukup baik. Penggunaan dana yang sumbernya dari pemerintah baik pusat atau daerah khususnya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, penggajian guru, dan peningkatan bangunan gedung sudah dilakukan dengan optimal.

**Kata Kunci:** Manajemen Pembiayaan, Sarana Prasarana, Pembelajaran

## PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di masyarakat. Hal ini menyebabkan tuntutan terhadap pendidikan semakin meningkat sehingga menjadi suatu tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan pendidikan dengan selalu tetap memberikan pelayanan yang baik.<sup>1</sup>

Semakin meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan, maka lembaga-lembaga pendidikan dihadapkan pada keperluan perluasan sumber daya pendidikan, sumber dana Pendidikan, keterampilan manajerial dan keorganisasian. Karena lembaga-lembaga pendidikan tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan atau tuntutan pendidikan saat ini dan masa yang akan datang. Suatu langkah yang perlu dijalankan untuk menghadapi perluasan adalah dengan menerapkan pengelolaan pembiayaan yang baik dalam lembaga pendidikan tersebut.<sup>2</sup>

Pembiayaan Pendidikan merupakan aktivitas yang berhubungan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima kemudian penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan. Pendapatan atau sumber dana yang diterima sekolah diperoleh dari APBN, APBD, dan masyarakat atau orang tua.<sup>3</sup>

Lembaga Pendidikan dari semua jenjang Pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi merupakan entitas organisasi yang dalam operasionalnya memerlukan dan membutuhkan dana untuk menggerakkan semua sumber daya yang dimilikinya.<sup>4</sup> Sebuah Lembaga Pendidikan yang sukses tidak akan terlepas dari dukungan biaya Pendidikan yang

---

<sup>1</sup> Edward Sallis, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, terj. Ahmad Ali Riyadi & Fahrurrozi, IRCiSoD, Jogjakarta, 2010 hal 33

<sup>2</sup> Edward Sallis, *Manajemen Mutus Terpadu Pendidikan*, 34.

<sup>3</sup> Akdon, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 23.

<sup>4</sup> Nina, dkk, *Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: WidyaPadjadjaran, 2017), 1.

tinggi, karena pada dasarnya mutu Pendidikan akan berbanding lurus dengan biaya Pendidikan yang dikeluarkan, semakin tinggi dan mahal biaya Pendidikan yang digunakan dan dikeluarkan maka semakin baik layanan Pendidikan.

Biaya Pendidikan merupakan salah satu unsur paling penting dalam sektor Pendidikan seperti sekolah, baik sekolah yang dikelola oleh pemerintah atau sekolah yang dikelola oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas yang menyebutkan bahwa, peran pembiayaan adalah salah satu unsur yang paling penting khususnya dalam sektor Pendidikan. Hal ini berhubungan dengan respon pemerintah melalui UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Pasal 46 menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini juga diperuntukan bukan untuk Pemerintah Pusat saja melainkan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana untuk terselenggaranya pendidikan bagi warga negara dari mulai usia tujuh tahun sampai usia lima belas tahun. Disinilah peran pemerintah daerah dan pusat mencurahkan dananya guna mendukung terselenggaranya Pendidikan dengan baik.

Pembiayaan Pendidikan memiliki keterkaitan yang berisi komponen-komponen yang bersifat mikro dan makro pada satuan Pendidikan. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun pada tujuan akhirnya sama, yakni, 1) Meningkatkan potensi sumber daya manusia, 2) Penyediaan setiap komponen sumber pembiayaan Pendidikan, 3) Menetapkan sistem dan mekanisme pengalokasian dana, 4) efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, 5) akuntabilitas yang dapat dipertanggung jawabkan dari aspek keberhasilan dan mudah terukur pada setiap tahun Pendidikan, 6) Menghindari terjadinya permasalahan yang terkait dengan penggunaan biaya Pendidikan.<sup>5</sup>

Sumber daya sarana dan prasarana (seperti tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, ruang kelas yang sesuai dengan jumlah siswa, bangunan sekolah yang relevan dengan kebutuhan) merupakan input penting yang diperlukan untuk berlangsungnya pendidikan di sekolah. Tanpa sumber daya sarana prasarana yang optimal, proses pendidikan di sekolah tidak akan berlangsung secara memadai, dan pada gilirannya sasaran sekolah tidak akan tercapai.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ferdi WP, *Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis* (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol, 19, Nomor 4, Desember, 2013), 566.

<sup>6</sup> Barnawi, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 47.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bertugas mempersiapkan tenaga-tenaga ahli dalam berbagai bidang yang merupakan sarana utama dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu sekolah sebagai lembaga pendidikan memerlukan penanganan yang lebih baik dan terarah agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun.

Namun untuk menghasilkan lulusan tersebut, terdapat hambatan yaitu masih sering ditemukan seperti sebagian sekolah tidak mampu meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarananya dengan baik.

Usaha yang dapat ditempuh dalam meningkatkan keberhasilan pendidikan ini selain memperbaiki dan mengoptimalkan proses belajar mengajar, juga memperbaiki, meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana. Karena bagaimanapun baiknya sekolah tersebut, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan suatu kebutuhan dan faktor penting dalam menunjang proses belajar mengajar, yang akan berdampak terhadap peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran.

Sedangkan, ketidakpedulian terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana akan berdampak pada rendahnya mutu kegiatan pembelajaran, karena kedudukan sarana prasarana pembelajaran dalam proses pembelajaran sangat strategis dalam upaya untuk mempertinggi proses interaksi guru siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. Dengan demikian, sarana prasarana yang tersedia dengan cukup memadai dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku sangat diperlukan dalam proses pembelajaran.

## **METODE DAN PENDEKATAN PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan pengumpulan dalam bentuk observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Observasi dilakukan terhadap perilaku kepala sekolah, guru dan pengurus komite sekolah dalam pemeliharaan sarana prasarana meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran, evaluasi dan pemeliharaan. Wawancara penulis lakukan dengan kepala sekolah, guru, dan pengurus komite sekolah dengan materi yang ditanyakan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Sedangkan studi dokumentasi penulis mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran.

Data yang diperlukan penulis gali dari berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu kepala sekolah, komite sekolah, guru. Penelitian yang dilakukan penulis meliputi pengamatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada, sampai pada penafsiran data. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Pengambilan sumber data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan *purpose sampling* yaitu berdasarkan pilihan dan pertimbangan peneliti, aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu terus menerus sepanjang pemilihan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi.<sup>7</sup> Atas dasar konsep tersebut, maka ketiga teknik pengumpulan data di atas digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi dan diharapkan informasi yang diperoleh saling melengkapi.

Analisis data penulis lakukan sejak awal hingga selesai penulisan laporan penelitian, dengan melalui tahap reduksi, display, dan penarikan kesimpulan.

Kriteria tingkat kepercayaan data didasarkan pada kebermaknaan data sehingga mempunyai arti yang dapat dipercaya. Proses pengajuan kepercayaan tersebut dilakukan melalui kegiatan 1) kredibilitas, 2) Transferabilitas, 3) Dependabilitas, 4) Konfirmabilitas.

Akhirnya panduan yang dituangkan dalam prosedur penelitian ini merupakan rambu-rambu untuk melakukan analisis dan penafsiran data sehubungan dengan pengolahan hasil penelitian. Akan tetapi langkah-langkah penelitian tersebut bisa saja diubah, sepanjang tidak mempengaruhi proses perolehan data dan proses keabsahan penafsiran dalam menyusun suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini akan diuraikan berdasarkan urutan pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu 1) Perencanaan dan sumber pembiayaan Pendidikan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran; 2) Pelaksanaan dan penganggaran dana dalam pemeliharaan sarana prasarana; 3) Pengawasan pembiayaan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran.

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Solo: Rineka Cipta), 234.

## 1. Perencanaan dan Sumber Pembiayaan Pendidikan dalam Pemeliharaan Sarana Pra Sarana Pembelajaran di MTs al-Misbah

Rencana pembiayaan adalah berkaitan dengan penjabaran pembiayaan dari program kerja tahunan sekolah atau madrasah. Pembiayaan yang direncanakan baik penerimaan maupun penggunaannya selama satu tahun itulah yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM). Dalam Depdiknas dijelaskan ada beberapa langkah dalam penyusunan RAPBS, yaitu: 1) Menginventaris program/kegiatan sekolah selama satu tahun mendatang; 2) Menyusun program/kegiatan tersebut berdasarkan jenis kerja dan prioritas; 3) Menghitung volume, harga satuan dan kebutuhan dana untuk setiap komponen kegiatan; 4) Membuat kertas kerja dan lembaran kerja, menentukan sumber dana dan pembebanan anggaran serta menuangkannya ke dalam format baku RAPBS/RAPBM; dan 5) Menghimpun data pendukung yang akurat untuk bahan acuan guna mempertahankan anggaran yang diajukan.<sup>8</sup>

Sebelum melakukan penyusunan rencana anggaran pembiayaan madrasah, langkah pertama yang dilakukan sekolah adalah mengidentifikasi biaya dan sumber daya dan sumber daya pasti membutuhkan uang sehingga langkah yang perlu diambil adalah analisis aktivitas untuk mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas Lembaga. Contoh seperti perlengkapan, pembelian, penyimpanan, furniture dan peralatannya, bangunan, gaji, tunjangan, dan lain-lain.

Proses identifikasi ini merupakan suatu langkah awal bagi sekolah dalam mengelola sumber dana dan bias mengetahui lebih jelas apakah sudah bias mencukupi pembiayaan sekolah atau sekolah perlu mencari sumber penerimaan yang lain apabila diperlukan.<sup>9</sup> Sumber-sumber tersebut kemudian dihitung lalu diperkirakan besaran angka nominalnya.

Dalam hal identifikasi, madrasah melakukan inventarisasi sumber daya apa saja yang dimiliki sebagai bentuk dukungan terselenggaranya Pendidikan. Adapun sumber yang harus di inventarisasi oleh madrasah sebelum dilaksanakannya perencanaan

---

<sup>8</sup> Inten Nurmalasari, dkk, *Pengelolaan Pembiayaan Madrasah Ibtidaiyyah Swasta di Bandung* (Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam, Vol, 5, No, 1, Juni 2019), 4.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kepala Sekolah

pembiayaan untuk dapat mendukung keberlangsungan Pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah dana yang tersedia, madrasah harus mengetahui berapa besar dana yang dimiliki.
- b. Tenaga pendidik dan kependidikan yang bertugas, madrasah harus mengetahui berapa banyak SDM yang terlibat dalam menyelenggarakan pembelajaran
- c. Sarana dan prasarana yang dimiliki, madrasah harus mengetahui berapa banyak sarana dan prasarana yang layak pakai atau harus diperbaiki, dan apa saja yang perlu untuk disediakan, dalam mendukung terselenggaranya Pendidikan.
- d. Material sisa, madrasah harus mengetahui material apa saja yang masih tersisa, sehingga dalam penyediaannya atau pembelian material di kemudian hari hanya pada yang kurang saja.<sup>10</sup>

Kepala sekolah lebih jauh menjelaskan bahwa sumber biaya madrasah diperoleh saat ini berasal dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan dari masyarakat. Sumber-sumber dana untuk madrasah dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1. Sumber-sumber Dana Madrasah**

Hal ini juga diungkapkan oleh Wakil kepala sekolah yang mengatakan bahwa, “saat ini sumber dana untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan, seperti membiayai program dan kegiatan madrasah, menggaji guru-guru, staf dan sarana prasarana. ya dari pemerintah, baik pusat atau daerah, selain itu sumber dana juga berasal dari iuran siswa, orang tua dan juga masyarakat.”<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kepala Sekolah

<sup>11</sup> Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah

Hal yang sama juga diungkapkan oleh kepala Bendahara, “untuk sumber dana, dari bayaran siswa setiap bulan sudah jelas, dari pemerintah, ada juga dana bantuan dari luar. Pengalokasiannya pun untuk mendukung keberlangsungan Pendidikan di sini, seperti menyediakan keperluan lab seperti alat-alat praktek, keperluan Madrasah, dan sarana prasarana”.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa anggaran Pendidikan MA al-Ikhlash Cicalengka berasal dari iuran siswa, bantuan dana dari luar (kelompok masyarakat), dan dana dari pemerintah (BOS). Sumber dana yang didapatkan kemudian di alokasikan atau digunakan untuk membiayai kebutuhan Madrasah seperti pembiayaan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, gaji guru, membiayai program dan kegiatan madrasah.

## **2. Pelaksanaan dan Penganggaran Dana dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah ditemukan beberapa temuan mengenai pelaksanaan dan penganggaran dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana, menurut kepala sekolah pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan langkah kedua setelah selesai dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, pihak sekolah selalu memandang bahwa pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah dua hal yang saling bergandengan dan perlu menjadi perhatian khusus bagi seluruh warga sekolah, baik dari tenaga pendidik, staf, dan peserta didik itu sendiri. Karena sarana dan prasarana selain sebagai penunjang ia juga berfungsi sebagai pendukung bagi keberlangsungan Pembelajaran.<sup>13</sup>

Lebih jauh kepala sekolah mengatakan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran selalu dilakukan oleh sekolah setiap saat, hal ini dilandasi oleh keinginan dari pihak sekolah untuk menjaga kondisi dari sarana tersebut untuk mampu digunakan secara optimal. Pemeliharaan ini tentunya dilakukan dengan cara pencegahan dan perbaikan. Pencegahan di sini yakni menjaga barang dengan cara merawat barang tersebut untuk tidak mengalami kerusakan, upaya yang dilakukan pun

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kepala Bendahara

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kepala Sekolah

melalui penempatan, pengontrolan dan pembersihan secara kontinyu terhadap sarana dan prasarana pembelajaran.<sup>14</sup>

Sementara itu, berkaitan dengan penganggaran dalam pemeliharaan sarana dan prasarana temuan penelitian menunjukkan bahwa penganggaran sarana disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pendapat salah seorang guru yang diwawancarai yang mengatakan bahwa,

“untuk penganggaran sarana dan prasarana pembelajaran yang di dahulukan adalah tingkat keparahan dari sarana dan prasarana itu sendiri, jika biaya yang dibutuhkan untuk penganggaran dalam hal pemeliharaan masih terjangkau oleh pribadi, maka saya sendiri yang menanggulangnya. Namun, apabila pemeliharaan sarana dan prasarana memerlukan biaya yang cukup tinggi, seperti kerusakan komputer, papan Tulis, kerusakan globe, dan peta maka pemeliharannya dilakukan oleh sekolah bekerjasama dengan komite sekolah”.<sup>15</sup>

Berdasarkan perencanaan penganggaran dalam hal pengadaan sekaligus pemeliharaan sarana dan prasarana ditentukan sesuai dengan kebutuhan, hal kepala sekolah lebih lanjut menjelaskan, bahwa “penganggaran dalam tahun ini mencapai Rp. 30,000,000,00 dengan total jumlah anggaran dalam setahun program kerja sarana dan prasarana mencapai RP. 120,570,000,00. Jadi, untuk pengalokasian anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana sekitar 25%”<sup>16</sup>

Dalam menyusun perencanaan penganggaran untuk saran dan prasarana pendidikan tentunya melalui prosedur penyampaian kebutuhan sarana dan prasarana kemudian mempertimbangkan secara matang hal ini selaras dengan pernyataan bagian bendahara yang mengatakan; “karena sudah masuk wilayah pembiayaan maka menyusun rencana anggaran sarana dan prasarana harus melewati jalur prosedur tidak sembarangan ditentukan, penganggarannya pun disesuaikan dengan kebutuhan, atau kita koordinasikan dulu dengan pihak yayasan. kalau untuk biaya perbaikan fasilitas sekolah, ya sekitar 3-5 jutaan dalam setahun”.<sup>17</sup>

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan penganggaran pihak sekolah selalu mengutamakan prosedur kemudian

---

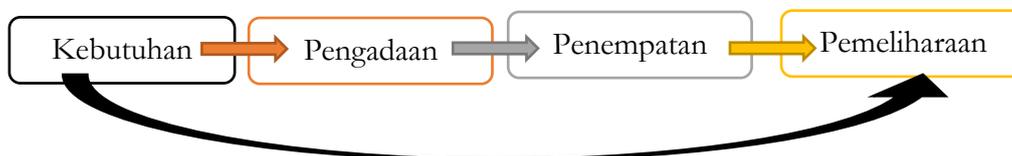
<sup>14</sup> Wawancara dengan Kepala Sekolah

<sup>15</sup> Wawancara dengan Guru PAI

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala Sekolah

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kepala Bendahara

mempertimbangkannya, dalam menyusun perencanaan anggaran selalu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ada.



**Gambar. 2. Alur Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan**

### 3. Pengawasan Pembiayaan dalam Pemeliharaan Sarana Prasarana pembelajaran

Pengawasan (*Controlling*) atau suatu kegiatan melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan pelaksanaan suatu program kerja yang telah direncanakan dengan tujuan agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam perencanaan.<sup>18</sup>

Pengawasan yang dilakukan pihak sekolah terhadap penganggaran pembiayaan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran dari pemerintah dilakukan secara berkala setiap sebelum melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban Pendidikan. Hal ini sesuai dengan hasil temuan di lapangan melalui wawancara dengan pihak komite sekolah mengatakan bahwa,

“pengawasan ini penting, dilakukannya pengawasan itu untuk mengevaluasi apakah pengeluaran dan penganggaran dan khususnya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dalam rencana kegiatan anggaran madrasah, pengawasannya juga macam-macam. Jika pengawasannya terhadap dana-dana yang berasal dari masyarakat, maka yang melakukan pengawasan dari pihak Yayasan, berbeda dengan dana yang diterima dari pemerintah seperti bos dan lain-lain itu dilakukan oleh pengawasan dari dinas yang ditunjuk kementerian agama.<sup>19</sup>

Dengan adanya hal tersebut, maka jelas bahwa dalam melaksanakan pengawasan harus terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau informasi yang nyata dan lengkap dari kegiatan pelaksanaan untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.

Temuan lapangan lain menunjukkan bahwa instrumen pengawasan dan supervisi yang digunakan dalam kegiatan pengawasan dan supervisi baik secara langsung

<sup>18</sup> Arita Marini, *Manajemen Sekolah Dasar*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2014), 185.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Komite Sekolah

maupun tidak langsung diantaranya adalah isian, daftar observasi dan *rating scale*. Dalam memilih atau menggunakan jenis instrumen tersebut kepala sekolah dan komite sekolah menyesuaikan ketepatannya itu sendiri dengan memperhitungkan kondisi sasaran.

Berdasarkan hal tersebut, menurut kepala sekolah yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan yaitu kegiatan ini harus dilakukan secara terus menerus, mulai dari persiapan, awal kegiatan, proses sampai akhir kegiatan. Kepala sekolah lebih jauh menjelaskan bahwa hal ini perlu dilaksanakan sesuai dengan pengertian dari pengawasan itu sendiri, yaitu suatu kegiatan mengikuti perkembangan suatu program dan pelaksanaannya secara mantap, teratur dan terus menerus dengan mendengar, melihat, mengganti dan mencatat keadaan serta perkembangannya. Temuan lapangan lain menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan berpedoman kepada prinsip saling mempercayai, hubungan horizontal, komunikatif dan pemberian bantuan.

Menurut kepala sekolah, prinsip saling mempercayai harus tumbuh di antara kepala sekolah dengan pengelola sarana prasarana yang dapat dicapai melalui interaksi yang baik. Hubungan horizontal diperlukan karena kegiatan ini melibatkan komunikasi. Komunikasi merupakan proses monitoring yang komunikatif. Hal ini mengandung makna bahwa kepala sekolah dan komite sekolah sebagai komunikator dan pihak komunikan memberikan umpan balik atau respon. Prinsip pemberian bantuan mengandung arti bahwa pengawasan adalah upaya untuk membantu pengelola sarana prasarana agar mereka mampu memahami permasalahan yang dihadapi dan mampu memecahkan permasalahan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dari hasil observasi diketahui bahwa usaha-usaha yang dilakukan kepala sekolah dan komite sekolah dalam mengawasi pengembangan sarana prasarana mengandung unsur penggerakan yaitu situasi, motivasi dan tujuan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis paparan data dan temuan penelitian dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembiayaan dalam memelihara sarana dan prasarana pembelajaran, MA al-Ikhlâs Cicalengka terlebih dahulu mengidentifikasi biaya dan sumber daya

dan sumber daya pasti membutuhkan uang sehingga langkah yang perlu diambil adalah analisis aktivitas untuk mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas Lembaga. Adapun sumber dana MA al-Ikhlas Cicalengka berasal dari pemerintah pusat, daerah, iuran siswa, orang tua dan kelompok masyarakat.

2. Pelaksanaan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran di MA al-Ikhlas selalu dilakukan setelah pengadaan sarana dan prasarana sudah terpenuhi. Dalam penganggaran dana, sekolah selalu tepat sasaran, baik dalam menganggarkan biaya untuk pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana atau kebutuhan atau program sekolah lainnya
3. Pengawasan Pembiayaan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh dua pihak, Yayasan sebagai pihak mengawasi keuangan yang datang dari selain dana BOS sedangkan untuk dana yang berasal dari pemerintah baik pusat maupun daerah diawasi langsung oleh kementerian agama..

## DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).  
Arita Marini, *Manajemen Sekolah Dasar*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2014).  
Barnawi, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).  
Edward Sallis, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, terj. Ahmad Ali Riyadi & Fahrurrozi, IRCiSoD, Jogjakarta, 2010.  
Ferdin WP, *Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis* (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol, 19, Nomor 4, Desember, 2013).  
Inten Nurmalasari, dkk, *Pengelolaan Pembiayaan Madrasah Ibtidaiyyah Swasta di Bandung* (Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam, Vol, 5, No, 1, Juni 2019).  
Nina, dkk, *Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: WidyaPadjadjaran, 2017).  
Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Solo: Rineka Cipta).

Wawancara dengan Guru PAI  
Wawancara dengan Kepala Bendahara  
Wawancara dengan Kepala Sekolah  
Wawancara dengan Komite Sekolah  
Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah